

**AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PASAR DI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**DELBI SELVINA
07011381520099**

Kosentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2019**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Delbi Selvina

Nim: 07011381520099

Jurusan: Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul akuntabilitas pemungutan Retribusi pasar di kabupaten penukal abab lematang ilir tahun 2018 ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuawan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri pendidikan nasional republic Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari. Ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada penmgaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini. Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihan manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 15 mei 2023



Delbi Selvina

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN PANUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

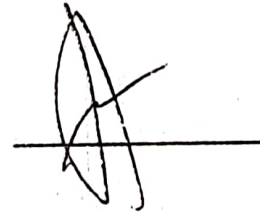
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
DELBI SELVINA
07011381520099

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001



Pembimbing II

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 " telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Juli 2019.

Palembang, 31 Juli 2019

Ketua:

1. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP.196406061992031001

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

4. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Mengetahui :

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1 002

ABSTRAK

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Salah satu pungutan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pelaksanaan Pemungutan Pelayanan Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar dengan sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan hasil retribusi belum maksimal sehingga dapat dikatakan tidak efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara kepada *key informan* dan data sekunder diperoleh dari dokumen atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan konsep Akuntabilitas menurut Mahmudi yang mengutip dari Hapwood dan Tomkins dan Elwood. Berdasarkan analisis dan penelitian disimpulkan pemungutan retribusi pasar pali sudah dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pencapaian target tetapi dalam pemanfaatan hasil retribusi belum maksimal dan juga masih kurang efektif nya penggunaan fasilitas pasar yang diberikan pemerintah sehingga kurang efisiennya penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum, dan transparansi pertanggungjawaban pemerintah diharapkan lebih akuntabel.

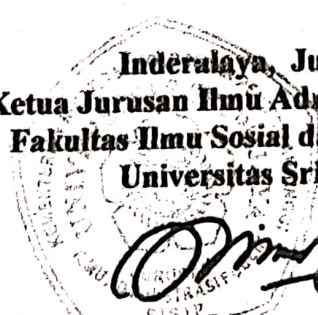
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemungutan Retribusi Pasar

Pembimbing I


Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP.197705122003121003

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003


Indralaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

Based on the source of the most potential Local Revenue and giving the biggest input to the local treasury is regional taxes and user fees. One of the levies levies based on Peraturan Bupati Abab Lematang Ilir Regulation number 18 of 2018 concerning Procedures for Market Management and Implementation of Market Service Levies Collection Services. These market levies are included in the general service levies which make a potential contribution to the improvement of development and public welfare. For that the local government must really use the results of market retribution as well as possible. But in reality the government's responsibility for the use of retribution results has not been maximized so that it can be said to be inefficient. This study used descriptive qualitative method. Primary data obtained are documentation, observation and interviews with key informants and secondary data obtained from documents or regulations relating to the problem under study. This study uses the concept of Accountability according to Mahmudi who quotes from Hapwood and Tomkins and Elwood. Based on the analysis and research, it can be concluded that the collection of the Pali market levies can be said to be effective if seen from the achievement of the target, but the utilization of retribution results has not been maximized and the use of market facilities provided by the government is still ineffective so that it is inefficient in using the minimum resources to achieve optimum results, and transparency of government accountability is expected to be more accountable.

Keywords: Accountability, Collection of Market Retribution

Pembimbing I


Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP.197705122003121003

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Inderalaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“tentukan didalam pikiranmu tujuan jelas yang ingin kamu capai maka kamu akan merasakan bahwa alam semesta akan membantumu menuju arah yang akan kamu mau” (Napoleon Hill).

Dengan rahmat Allah Swt, maka skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tersayang yang telah mendidik, atas cinta dan kasih mereka yang tulus merawat saya serta ridho dan doa yang selalu beliau berikan.
2. Teman-teman mahasiswa seperjuangan administrasi publik angkatan 2015 dan sahabat-sahabatku yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta yang akan selalu kubanggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat kasih dan ridhonya penceliti mendapatkan kemudahan dan kekuasaan sehingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul “Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018”.

Skripsi ini hanyalah merupakan bagian kecil dari rangkaian proses panjang yang peneliti lalui untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta bantuan dalam berbagai bentuk dari berbagai pihak sehingga proses penyelesaian skripsi penelitian ini dapat peneliti lalui dengan baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Soheriyanto yang telah memberikan nasihat, doa dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
2. Mama kandung saya yang sudah berada di surga yaitu Ibu Yuliana yang selalu saya ingatkan selamanya dihati saya sebagai penyemangat hidup saya.
3. Wak ibu yen yang telah memberikan nasihat dan doa serta memberikan semangat kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang ikut berperan dalam mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan masukan serta saran dan arahan dalam proses penyelesaian laporan penelitian ini.
8. Bapak Sofyan Effendy, S.Ip., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan masukan serta saran dan arahan dalam proses penyelesaian laporan penelitian ini.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selaku yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Penelitian di Pasar Pali.
10. Sary Yulis selaku ayuk tapi tak sedarah yang selalu menasihati dan memberikan masukan dan mendorong saya untuk menyelesaikan Laporan Penelitian ini.
11. Zumrothul Fadilah, Melly Susanti sebagai partner yang baik memberikan informasi serta nasihat dan dukungan yang berarti bagi saya.
12. Adelya Anastasya dan Tartila Pratiwi sebagai rekan partner yang memberikan saya dukungan untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.
13. Elsa, Dea, Nia, Elvira sebagai partner terlama dari sekola dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.

14. Teman dan Sahabat terdekat saya yang mendoakan serta memberikan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Seluruh Bapak, Ibu Dosen serta Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
16. Rekan-rekan seangkatan adminitrasi Publik 2015

Dalam penelitian ini dengan judul “Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018”. Diharapkan dapat memberi wawasan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukanya. Untuk itu, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan diasa yang akan datang.

Palembang, Juli 2019

Peneliti

Delbi Selvina
NIM: 07011381520099

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Keuangan Negara/Daerah dalam Administrasi Negara.....	7
C. Akuntabilitas.....	9
D. Retribusi Daerah.....	12
E. Retribusi Pasar.....	17
F. Pemungutan Retribusi Pasar.....	19
G. Azaz-azaz Pemungutan Retribusi/Pajak.....	20
H. Penelitian Terdahulu.....	22
I. Teori yang digunakan.....	22
J. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Definisi Konsep.....	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Teknik Penentuan Informan.....	25
E. Data dan Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum.....	30
1. Gambaran Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	30
a. Geografi, Administratif dan Kondisi Fisik Kabupaten Pali.....	31
b. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	33

2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	35
3. Pembagian Struktur, Tugas dan Wewenang.....	36
a. Struktur Organisasi.....	36
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	37
c. Kekuatan Personalia.....	41
B. Retribusi Pelayanan Pasar.....	42
C. Analisis Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2018.....	44
1. Akuntabilitas Pemungutan Retribusi.....	45
2. Indikator Penelitian.....	46
a. Pemungutan Retribusi secara Efektif.....	46
b. Laporan Pertanggungjawaban.....	55
c. Transparansi.....	60
3. Implikasi Temuan terhadap Teori dan Praktek.....	63
a. Implikasi Teoritis.....	63
b. Implikasi Praktis.....	64
AB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
AFTAR PUSTAKA.....	xv

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Pasar yang di Bina oleh Pemerintah Kabupaten PALI.....	4
Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar.....	4
Tabel 3 Tarif Retribusi Pasar.....	4
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 5 Fokus Penelitian.....	25
Tabel 6 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan.....	31
Tabel 7 Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten PALI.....	33
Tabel 8 Jumlah Penduduk Kabupaten PALI.....	35
Tabel 9 Kekuatan Personalia.....	42
Tabel 10 Tarif Retribusi.....	43
Tabel 12 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar.....	47
Tabel 11 Fasilitas Kios, Los dan Pelataran Kaki Lima.....	49
Tabel 12 Jumlah Penyewa Penghuni Kios dan Los.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	20
Gambar 2 Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 3 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pali.....	23
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pali.....	36
Gambar 5 Penunjukan Penghuni Penyewa Petak Kios dan Los.....	51
Gambar 6 Kondisi Pasar Tanah Abang.....	52
Gambar 7 Wawancara Pedagang Pasar Tanah Abang.....	54
Gambar 8 Bukti Kwitansi Penerimaan Sewa Kios.....	58
Gambar 9 Karcis Retribusi Pelayanan Pasar.....	59

DAFTAR SINGKATAN

SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKRDKBT	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
STRD	: Surat Tagihan Retribusi Daerah
SIPT	: Surat Izin Penunjukan Tempat
SPDORB	: Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
KIPTB	: Kartu Izin Penunjukan Tempat Berdagang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I dan II
- Lampiran 3. Surat Penelitian
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Karcis/Kwitansi
- Lampiran 6. Daftar Pasar yang di Bina Pemerintah Kabupaten Pali
- Lampiran 7. Penunjukan Penghuni/Penyewa Petak Kios/Los Pasar Impres Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Lampiran 8. Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2018 Tentang Cara Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemungutan Pelayanan Retribusi Pasar Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir
- Lampiran 9. Peraturan Bupati No. 059 Tahun 2017 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu pengelolaan harus menjadikan *good government* sebagai prinsip yang dimana *good government* Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. dalam prakteknya, konsep *good government* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*). Dasar-dasar hukum dari *good government* yakni terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Dalam penelitian ini salah satu yang digunakan pada prinsip *good government* adalah akuntabilitas dalam kontek pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas0luasnya dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Sementara itu Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berada pada pemerintah konkuren.

Kewenangan pemerintah konkuren ini meliputi kewenangan daerah atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah. Urusan pemerintah wajib adalah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2009:34).

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Menurut Devas (dalam soleh, 2010:71) Sekalipun demikian, di beberapa daerah justru retribusi daerah merupakan sumber penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan (Siahaan, 2006:6).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Adapun jumlah pasar yang dibina pemerintah kabupaten Pali yang terbagi menjadi 3 (Tiga) kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1 Jumlah Pasar yang Dibina oleh Pemerintah Kabupaten PALI 2016

No	Kecamatan	Jumlah Pasar/ Kalangan	Sarana Pasar		
			Kios	Los	Pelataran kaki lima
1.	Talang Ubi	17	323	167	150
2.	Penukal	10	140	27	90
3.	Tanah Abang	5	191	187	315
Jumlah		32	654	381	555

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten PALI

Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari kios, los dan halaman/pelataran dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi yang dikenakan Pasar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan peraturan bupati No.18 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Tarif Retribusi Pasar Kabupaten PALI

No.	Bentuk bangunan	Tarif Retribusi Pasar
1.	Kios (Permanen)	Rp. 20.000,-/perbulan
2.	Los (Permanen)	Rp. 10.000,-/perbulan
3.	Halaman/pelataran	Rp. 1.000,-/hari

Sumber: Peraturan Bupati Pali No.18 tahun 2014

Berikut ini dapat dilihat Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi pasar tahun 2016-2018 pada tabel 1.2:

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten PALI Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	Rp. 350.000.000,-	Rp. 329.000.000,-	94%
2.	2017	Rp.350.000.000,-	Rp. 357.000.000,-	102%
3.	2018	Rp. 387.000.000,-	Rp. 291.111.000,-	75%

Sumber: dinas Perdagangan dan Perindustrian PALI

Dari pengamatan awal peneliti permasalahan Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan Akuntabilitas yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat

atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat kondisi pasar di Kabupaten Pali (Panungkal Abab Lematang Ilir), Namun pada kenyataannya dari data tersebut terlihat realisasi pendapatan penerimaan retribusi pasar yang besar uniknya pengelolaan pada retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar. masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi –kondisi fisik maupun non-fisik yang membutuhkan penanganan pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada dikabupaten Pali. Jumlah pasar yang dibina oleh pemerintah kabupaten Pali terbagi dalam 3 (Tiga) kecamatan yang masih sangat perlu diadakan perbaikan dikarenakan kondisi masih kurangnya frekuensi penyediaan air bersih, penyapuan/pembersihan sampah, petugas kebersihan, penyediaan TPS, Penyediaan TPA dan alat kebersihan lainnya. Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian dituntut untuk bisa mempertanggung jawabkan segala tugas dan fungsinya.

Dilihat dari tabel 1.2 pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi pasar adalah tidak stabil setiap tahunnya selama tiga tahun dari tahun 2016-2018 selalu mengalami perubahan dalam jumlah realisasi retribusi pasar terhadap target. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi retribusi pasar (karcis pasar) pada tahun 2016 mencapai Rp.329 juta atau berkisar 94% dari target, pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan mencapai 2% mencapai di angka Rp.357 juta lebih dari target, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan mencapai Rp.291 juta atau 75% dari target.

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi retribusi pasar termasuk besar dalam pencapaian target yang dimana pemerintah harus sepadan dengan fasilitas yang diberikan untuk pedagang dan pembeli pada pasar. Maka dari uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian ini, terdapat permasalahan utama yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritiss

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan referensi dan menjadi sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis bidang politik khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bahan acuan, bagi pengembangan dalam bidang politik khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam konsep Proses pemungutan retribusi pasar di kabupaten pali.

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai sumbangan bagi pihak ataupun masyarakat yang ingin mengetahui dan memperluas wacana seputar pemungutan Retribusi Pasar dikabupaten Pali.
2. Memberi manfaat bagi peneliti agar lebih memahami tentang faktor-faktor yang terjadi pada pemungutan retribusi pasar dikabupaten pali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaho, J. Riwu, 1988. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Askara
- Mahmudi. 2013, *Manajemen Kinerja Setor Publik Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Serjono, Soekanto. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali
- Suparmoko, 2012. *Keuangan Negara dan Daerah*: Pustaka Setia
- ugiyono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo

Jurnal & Skripsi:

- Ainun Latifah. 2018. *Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Skripsi*. Lampung: Program Sarjana Fakultas Ekonomi UIN Raden Intan
- Hendy Septiawan. 2012. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Beberapa Pasar Palembang Skripsi*. Palembang: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro
- Hendy Septiawan. 2012. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Beberapa Pasar Palembang Skripsi*. Palembang: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

Internet:

- file:///C:/Users/Z14/Downloads/Documents/DOCRPIJM_1503134281Bab_4_Profil_PALI_SY.pdf (diakses 18 juni 2019)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penukal_Abab_Lematang_Iilir (diakses 18 juni 2019)
- <http://docplayer.info/38605019-Profil-kabupaten-penukal-abab-lematang-ilir-tahun-2013.html> (diakses 18 juni 2018)
- <http://kabarpali.blogspot.com/2016/11/makna-logo-pali.html> (diakses 18 juni 2019)